



***Korespondensi**

Email¹ : riksapraba@gmail.com

Email² : ranty.purnama@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

INOVASI TEKNOLOGI DALAM DALAM PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK PERKOTAAN

**(Studi Inovasi Daerah di Kota Bekasi dan Kabupaten
Gresik)**

**Muhammad Riksa Praba Haskara^{1*}, Ranty
Purnamasari^{2*}**

^{1,2} Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi | Jl. Jend. Ahmad Yani No.1,
RT.001/RW.005, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat
17144

Disetujui: 30 Januari 2021

Abstract

Innovation is seen as a necessity because it can solve the problem of bureaucratic pathology, improve the quality of public services, maximize the potential of the apparatus, and restore public trust. Innovation is also influenced by the rapid development of information technology. This study aims to analyze the innovations carried out by Kota Bekasi and Kabupaten Gresik which have a purpose to realize an idea or creative thinking, which is related to technology as a breakthrough to facilitate performance. This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research that aims to find out more deeply the facts about innovation. The population in this study are cities that have made innovations related to public services, while the samples in this study are innovations made by Bekasi City and Gresik City. This research shows that Kota Bekasi and Kabupaten Gresik succeeded in creating innovations in the field of public services, where in these two cities have created an idea or creative thinking, which is related to technology as a breakthrough to facilitate performance. The results of the innovation of the SIAP PPDB Online Service in Bekasi City, including Without Installation & Cloud-Based, Multi Platform & Multi Access, Responsive Design, Multi Registration Flow Model, Multi Line Selection, Real Time Process, so it can manage prospective student data automatically. and immediately every time starting from the registration process, selection to announcement of results. Meanwhile, the results of the e-Planning Application in Gresik Regency have the objective of implementing planning using Web-based information technology that is integrated and user friendly, aligning / integrating medium-term strategic planning into annual planning, mapping program proposals and activities from DPRD, Leadership Elements. and planning documents that have been determined, compiling a budget work plan quickly and accurately, and integrating planning, budget execution, through to monitoring and evaluation.

Keywords: Innovation, Urban, Creative Ideas, Government, Technology

Abstrak

Inovasi dipandang sebagai kebutuhan karena dapat mengatasi masalah patologi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi aparatur, serta mengembalikan kepercayaan publik. Inovasi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dan

Kabupaten Gresik yang memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu ide atau pemikiran kreatif, yang berkaitan dengan teknologi sebagai terobosan untuk mempermudah kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam fakta-fakta mengenai inovasi. Populasi dalam penelitian ini adalah kota yang pernah melakukan inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kabupaten Gresik. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi dan Kabupaten Gresik berhasil untuk menciptakan inovasi pada bidang pelayanan publik, dimana pada kedua kota ini telah menciptakan suatu ide atau pemikiran kreatif, yang berkaitan dengan teknologi sebagai terobosan untuk mempermudah kinerja. Hasil dari adanya inovasi Layanan SIAP PPDB Online di Kota Bekasi, yaitu diantaranya Tanpa Instalasi & Berbasis Cloud, Multi Platform & Multi Akses, Responsive Design, Multi Model Alur Pendaftaran, Multi Jalur Seleksi, Real Time Process, sehingga dapat mengelola data calon siswa secara otomatis dan langsung setiap waktu mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil. Sedangkan, hasil dari adanya Aplikasi e-Planning di Kabupaten Gresik mempunyai tujuan untuk menerapkan perencanaan menggunakan teknologi informasi berbasis Web yang terintegrasi dan user friendly, menyelaraskan/mengintegrasikan perencanaan strategis jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan, memetakan usulan program dan kegiatan dari DPRD, Unsur Pimpinan dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, menyusun rencana kerja anggaran dengan cepat dan tepat, serta mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan anggaran, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci : Inovasi, Perkotaan, Ide Kreatif, Pemerintah, Teknologi

I. PENDAHULUAN

Lima huruf yang dirangkai menjadi satu kata, yang sering diketemukan dalam khasanah Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berpendekatan New Public Management, adalah inovasi. Sejak kepercayaan terhadap

organisasi publik melemah drastis gara-gara inefisiensi organisasi publik yang terus menurun tajam dan terjadinya krisis multi aspek yang berkepanjangan serta fenomena globalisasi yang terus berkecamuk dan mewabah, inovasi menjadi kunci utama dalam pemecahan masalah. Semakin kompleksnya masyarakat, baik kualitatif maupun kuantitatif, memaksa birokrasi pemerintah memasuki ke hampir seluruh lini kehidupan masyarakat. Ini berarti, walaupun ada kecenderungan semakin menguatnya partai politik dan legislatif, peran birokrasi semakin penting. Justru kondisi ini yang memungkinkan bahkan mengharuskan peran birokrasi semakin mengedepan (*bureaucratic heavy*). Dimana, keberadaan birokrasi dalam masyarakat harus selalu dalam koridor menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan zamannya. (Noor, 2013: 1) Tantangan besar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif. (Cordella & Tempini, 2015; Kettl, 2015) Dalam rangka itulah, maka negara membangun suatu sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. (Yusriadi & Misnawati, 2017: 100)

Beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah modernisasi manajemen kepegawaian, restrukturisasi, downsizing dan rightsizing, perubahan manajemen dan organisasi, rekayasa proses administrasi pemerintahan, anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif, serta hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. (Prasojo & Kurniawan, 2008: 2)

Salah satu cara mengatasi masalah birokrasi adalah dengan "inovasi". (Andhika, 2017: 50). Pasalnya, inovasi dipandang sebagai kebutuhan karena dapat mengatasi masalah patologi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi aparatur, serta mengembalikan kepercayaan publik. Inovasi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat. (Sofianto, 2019: 100) Pendapat yang dikemukakan oleh (Banerjee, B., & Ceri, 2015; Černe et al., 2013) menyatakan bahwa menumbuhkan budaya inovasi dan memunculkan ide-ide kreatif yang dilakukan

oleh pimpinan dapat menjadi motivasi aparatur birokrasi untuk mulai berpikir tentang ide-ide baru. Berbagai pandangan seperti (Crivits et al., 2014; Uslu, 2015) menguraikan, inovasi pada pemerintah bertujuan hanya untuk menyelesaikan masalah birokrasi (patologi birokrasi). Inovasi pada bidang pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu ide atau pemikiran kreatif, yang berkaitan dengan teknologi sebagai terobosan untuk mempermudah kinerja. (Basuki, Yayuk, Rulinawaty Kasmad, 2018: 210)

Seperti halnya inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi yaitu Layanan SIAP PPDB Online yang bertujuan untuk mendukung implementasi PPDB sesuai Permendikbud No. 44 Tahun 2019 dengan tetap mengedepankan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten terkait zonasi domisili dengan sekolah yang feksibel dan terukur.

Terdapat juga inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Gresik bernama Inovasi Aplikasi e-Planning Terintegrasi Maksimal, dimana ide tersebut muncul dilatar belakangi oleh permasalahan dari kondisi perencanaan dan penganggaran saat ini adalah sering adanya ketidaksinkronan antara perencanaan yang telah dibuat dan disepakati dengan penganggarnya. Hal ini karena dalam penyusunan anggaran sering ada intervensi dari pihak yang mempunyai kepentingan, sehingga mengakibatkan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah tidak tercapai.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk mewujudkan suatu ide atau pemikiran kreatif, yang berkaitan dengan teknologi sebagai terobosan untuk mempermudah kinerja.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam fakta-fakta mengenai inovasi. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti

secara mendalam. (Gunawan, 2013: 3) Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif. (Tahir, 2017: 18) Sedangkan dasar penelitiannya adalah survey yakni tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai inovasi yang dilakukan oleh dua kota di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah kota yang pernah melakukan inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dan Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk mewujudkan suatu ide atau pemikiran kreatif, yang berkaitan dengan teknologi sebagai terobosan untuk mempermudah kinerja.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi Layanan SIAP PPDB Online pada Kota Bekasi

Layanan SIAP PPDB Online adalah sebuah Sistem Layanan yang dirancang untuk memfasilitasi otomasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata melalui Internet. Layanan ini disediakan menggunakan Teknologi Web dan Cloud Computing (Komputasi Awan) yang dapat membantu sekolah dalam melaksanakan Layanan PPDB dengan lebih mudah, cepat, transparan, akurat dan akuntabel secara Online di Internet.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan secara Online bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Selain itu PPDB juga menjadi upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan, sehingga tidak terdapat lagi beberapa sekolah yang sangat diminati oleh pendaftar, sedangkan di beberapa sekolah lainnya kurang peminat.

Di beberapa kasus, siswa yang berdomisili di sekitar sekolah tetapi tidak diterima masuk ke sekolah yang diminati dan harus mendaftar

ke sekolah lain yang lebih jauh tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam hal ini mencoba menyelesaikan yang tertuang dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

PPDB Online hadir untuk mendukung implementasi PPDB sesuai Permendikbud No. 44 Tahun 2019 dengan tetap mengedepankan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten terkait zonasi domisili dengan sekolah yang feksibel dan terukur.

Manfaat yang diperoleh bagi Dinas Pendidikan dan Sekolah yaitu diantaranya efisiensi pembiayaan dan mengurangi resiko terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), meningkatkan reputasi sekolah, memberikan akses yang luas kepada masyarakat, serta tersedianya sebuah basis data terintegrasi bagi pihak Dinas Pendidikan maupun Sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru. Sedangkan manfaat yang diperoleh bagi Siswa dan Orang Tua Siswa, yaitu diantaranya mempermudah untuk melakukan pendaftaran siswa baru, mempermudah akses informasi penerimaan siswa baru, pendaftaran menjadi lebih tertib dan mudah dipantau, serta fasilitas dan pelayanan memuaskan dari pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan.



Sumber: SIAP PPDB Online | Kota Bekasi (siap-ppdb.com)

Hasil dari adanya inovasi Layanan SIAP PPDB Online di Kota Bekasi, yaitu diantaranya yaitu tanpa instalasi & berbasis cloud, dimana layanan ini tidak perlu instal software aplikasi tertentu, tidak perlu pengadaan hardware server tertentu, cukup akses layanan basis web dan cloud dengan koneksi internet saja. Selain itu, aplikasi ini juga multi platform & multi akses, sehingga dapat diakses melalui dekstop, laptop, tablet maupun mobile phone baik

dengan layanan internet, SMS dan aplikasi android. Responsive Design, tampilan dapat menyesuaikan perangkat yang digunakan sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses layanan PPDB online. Lalu, bersifat multi model alur pendaftaran, mengakomodir pendaftaran online secara mandiri dan/atau datang langsung ke sekolah, dan lain-lain. Aplikasi ini pun multi jalur seleksi, dimana dapat mengakomodir implementasi PPDB Online berbagai Jalur. Menyesuaikan kondisi daerahnya. Sesuai aturan Permendikbud (Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, Jalur Afrmasi, Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali. Dan juga real time process, dalam mengelola data calon siswa secara otomatis dan langsung setiap waktu mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil.

B. Inovasi Aplikasi e-Planning Terintegrasi Maksimal pada Kabupaten Gresik

Pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengendalian. Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan perencanaan program dan kegiatan tahunan daerah yang disesuaikan dengan siklus anggaran dan merupakan suatu kegiatan menyeluruh melalui pendekatan top down approach maupun bottom up approach. Permasalahan dari kondisi perencanaan dan penganggaran saat ini adalah sering adanya ketidaksinkronan antara perencanaan yang telah dibuat dan disepakati dengan penganggarnya. Hal ini karena dalam penyusunan anggaran sering ada intervensi dari pihak yang mempunyai kepentingan, sehingga mengakibatkan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah tidak tercapai.

Hal penting lainnya adalah didalam penentuan kebijakan pembangunan daerah, pendekatan bottom up approach melalui penggalian aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan sangat penting dan harus dilakukan. Penggalian aspirasi masyarakat dapat dilakukan melalui tiga jalur yaitu Jalur Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimana masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya secara langsung

sesuai dengan tingkatannya, Jalur Politik atau melalui partai politik yang dilakukan oleh anggota dewan dalam masa reses, dan Jalur birokrasi yang dapat langsung disampaikan melalui SKPD maupun kepala daerah.

Musrenbang sebagai jalur utama didalam menyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat didalam penentuan perencanaan pembangunan. Melalui musrenbang, mayoritas aspirasi masyarakat disalurkan sebagai masukan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya. Permasalahan yang saat ini muncul adalah, walaupun sebagai jalur utama aspirasi masyarakat, aspirasi yang disampaikan di jalur ini juga dapat dikatakan sebagai jalur yang paling lemah pada proses perumusan agenda dan usulan kegiatan.

Salah satu hal yang menyebabkan aspirasi masyarakat pada musrenbang lemah adalah karena pemerintah memandang bahwa masyarakat sipil tidak mempunyai informasi yang cukup tentang Visi, Misi dan tujuan pemerintah daerah yang hendak dicapai. Hal tersebut menyebabkan usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sesuai dengan program-program pemerintah. Permasalahan kedua terkait musrenbang adalah, ketika musrenbang masih dilaksanakan secara manual (sebelum menggunakan e-Planning) seringkali Pemerintah daerah (dalam hal ini Bappeda kabupaten Gresik) kesulitan dalam memilah-milah dan memasukkan usulan masyarakat ke dalam kebijakan, program dan kegiatan perencanaan pembangunan. Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara umum adalah jumlah usulan Musrenbangdes sangat banyak & beragam jenisnya, aplikasi sebelumnya (untuk Musrenbang Desa sampai Musrenbang Kecamatan) & RKPD Online, di mana kedua aplikasi tersebut belum terkoneksi, sehingga usulan desa diadopsi secara manual ke dalam Draft Renja OPD, RKPD Online belum terkoneksi ke KUAPP AS & RAPBD sehingga perlu entry manual pada saat penyusunan RKA, serta konsistensi antara Perencanaan & Penganggaran belum dapat dijamin 100%.

Perencanaan dan penganggaran terintegrasi adalah perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran menjadi kesatuan proses yang saling terkait, konsisten dan berkelanjutan. Melalui e-Planning rangkaian proses

perencanaan pembangunan dilalui dalam tahapan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan berkualitas serta dapat dikontrol oleh masyarakat. Tahapan tersebut adalah Perencanaan Jangka Menengah, Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, RKPD-PPAS, dan RKPD-PPAS Perubahan.

Apa yang dilakukan e-Planning di Kabupaten Gresik seperti dalam mengatasi permasalahan di atas sesuai dengan Program Kedua pada Sembilan Program (Nawa Cita) Jokowi-JK yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi. Selain itu, system e-Planning Kabupaten Gresik yang terintegrasi dengan e-Budgeting merupakan upaya untuk menjalankan Program Keempat pada Sembilan Program (Nawa Cita) Jokowi-JK yaitu melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.



Sumber: ...ePlanning... (gresikkab.go.id)

Aplikasi e-Planning mempunyai tujuan sebagai berikut, diantaranya yaitu menerapkan perencanaan menggunakan teknologi informasi berbasis Web yang terintegrasi dan user friendly, menyelaraskan/ mengintegrasikan perencanaan strategis jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan, memetakan usulan program dan kegiatan dari DPRD, Unsur Pimpinan dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, menyusun rencana kerja anggaran dengan cepat dan tepat, serta mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan anggaran, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Manfaat utama dengan adanya aplikasi e-Planning diantaranya yaitu terjaminnya konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD / Renja SKPD dengan penganggaran (RAPBD). Pada Tahun

2016, kegiatan APBD yang tidak sinkron dengan RKPD sebanyak 105 kegiatan dan 5 program. Selain itu, pada tahun 2016, program di RKPD yang tidak sinkron dengan RPJMD sebanyak 81 program. Lalu pada tahun 2017, karena sudah menggunakan e-Planning terintegrasi maka konsistensi antara RPJMD-RKPD dan APBD dapat tercapai 100%. Selain itu, efisiensi waktu dan meminimalkan kesalahan perekapan data. Pada Tahun 2016, dimana belum menggunakan e-Planning, pelaporan dan perekapan data dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu satu minggu penuh dan mengharuskan staf Bappeda lembur di luar jam kerja untuk menyelesaikan terutama untuk persiapan bahan Musrenbang Kabupaten. Sebelum menggunakan e-Planning pelaporan dilakukan secara manual menggunakan Form Excel yang mana pelaksanaannya lebih sulit dan memungkinkan terdapat kesalahan perekapan. Setelah adanya e-Planning terintegrasi pada tahun 2017 pelaporan di setiap tahapan dapat dilakukan secara langsung sesuai kebutuhan atau form yang telah ditetapkan dalam format .pdf, .xls, dan .doc sehingga hanya membutuhkan waktu dua hari kerja tanpa lembur. Perekapan secara langsung dengan menggunakan sistem look up data, meminimalkan terjadinya kesalahan entri data dan konsistensi dapat tercapai.

Sebelum adanya e-Planning sebagai aplikasi perencanaan berbasis online terintegrasi, Bappeda Kabupaten Gresik sebagai institusi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara perencanaan daerah telah melalui tahap-tahap menuju perbaikan. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut yaitu pertama, sebelum tahun 2014, proses perencanaan daerah mulai musrenbang hingga terbentuk KUA-PPAS masih dilakukan secara manual tanpa alat bantu aplikasi. Pada tahap ini ditemukan berbagai macam masalah yaitu antara lain yaitu waktu penyelenggaraan pada setiap tahap perencanaan seringkali tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan, banyak usulan desa maupun kecamatan yang tidak terekam dengan baik, bahkan seringkali berubah-ubah akibat kepentingan tertentu, Verifikator bappeda kesulitan dalam memilah usulan yang ada. Kedua, tahun 2015, Bappeda telah mempunyai aplikasi perencanaan yang mengakomodasi proses musrenbang tingkat

desa dan kecamatan yang bernama e-musrenbang. Aplikasi ini mempunyai permasalahan utama yaitu platform aplikasi berbeda dengan aplikasi yang digunakan Bagian Penganggaran/Keuangan Daerah sehingga memerlukan dua kali kerja. Selain itu, output pada aplikasi ini hanya sampai pada usulan Musrenbang Desa/kelurahan dan Kecamatan, tahapan selanjutnya masih belum terakomodasi. Ketiga, tahun 2016, Bappeda telah membangun aplikasi RKPD Online, di mana aplikasi ini telah memfasilitasi tahapan perencanaan mulai dari Forum SKPD (Renja SKPD) sampai RKPD. Belum mampunya aplikasi ini untuk sampai pada tahap KUA-PPAS menjadikan output RKPD Online masih belum bisa terintegrasi dengan aplikasi penganggaran daerah. Keempat, Tahun 2017, aplikasi e-Planning dikembangkan, menggabungkan e-musrenbang dan RKPD Online menjadi satu aplikasi, dengan output RKPD, KU-PPAS yang terintegrasi dg penganggaran (SIPKD). Pada saat ini juga sudah ada tambahan menu Pokir namun belum terintegrasi ke dalam RKPD. Kelima, tahun 2018, aplikasi e-Planning Terintegrasi Maksimal dikembangkan untuk mengakomodasi renbang Kab Gresik untuk tahun anggaran 2019 terintegrasi dengan aplikasi Penganggaran (SIPKD). Pokir sudah dapat diintegrasikan dengan RKPD. BTL sudah bisa diverifikasi oleh SKPD yang bertanggungjawab.

Setelah menggunakan e-Planning Terintegrasi Maksimal yang mulai digunakan pada tahun 2018 untuk menyusun RKPD tahun 2019 terdapat perbaikan-perbaikan pelaksanaan perencanaan daerah sebagai berikut yaitu pertama, penyusunan Renstra SKPD konsisten dengan Program, capaian program, dan indikator kinerja RPJMD. Kedua, usulan musrenbang Desa/Kelurahan lebih mudah karena sudah dilakukan mapping kegiatan dan dapat langsung dipisahkan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta dapat memisahkan Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial. Ketiga, usulan musrenbang Kecamatan dapat secara langsung mengambil data (mengakomodir) dari usulan musrenbang desa dengan melakukan transfer kegiatan. Keempat, rancangan awal SKPD dapat secara langsung transfer data dari tahapan renstra yang kemudian disesuaikan isian yang diperlukan yaitu tolak ukur, target

kinerja tahun (n) dan target kinerja tahun (n+1). Pagu pada Rancangan awal kemudian disesuaikan dengan Surat Edaran Bupati Gresik No. 90/119/437.71/2018 tentang Pedmoman Prioritas Sasaran Pembangunan Tahun 2019. Kelima, Forum SKPD dilakukan secara langsung dengan transfer tahapan rancangan awal dengan penyesuaian pagu kegiatan/program hasil rapat Forum SKPD yang telah disepakati. Hasil tahap forum SKPD kemudian ditransfer menjadi bahan musrenbang kabupaten dan kemudian menjadi rancangan RKPD untuk kemudian ditetapkan. Keenam, Pokok-Pokok Pikiran Dewan (Pokir) pada e-Planning Terintegrasi Maksimal di Kabupaten Gresik pada tahun 2018 sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana saat ini usulan pokir diharuskan mengambil data yang telah tersedia di database e-Planning yang merupakan usulan musrenbang desa. Bagi usulan pokir yang tidak mengambil usulan musrenbang desa harus dilengkapi dengan berita acara yang melibatkan Kepala Desa, Camat, dan SKPD terkait. Usulan pokir kemudian diverifikasi SKPD untuk menentukan layak tidaknya usulan juga melalui aplikasi e-Planning. Usulan pokir diharapkan benar-benar atas kepentingan desa yang bersangkutan tidak hanya karena kepentingan politik semata.

C. Prinsip dan Strategi Utama dalam Berinovasi

Prinsip dan strategi utama untuk inovasi dalam pemerintahan adalah meliputi Mengintegrasikan layanan, desentralisasi pemberian layanan, memanfaatkan kemitraan, melibatkan warga Negara, serta memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ciri kelima memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan keniscayaan seiring dengan perkembangan global, dengan apa yang disebut era disruption. (Sururi, 2017: 9)

Kemudian Wijayanti (2012) dalam penelitiannya tentang implementasi inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan menyimpulkan bahwa keberhasilan inovasi kebijakan tercipta karena berbagai faktor yaitu inisiatif dan komitmen Walikota, perubahan mindset sehingga terbangun kepercayaan dalam pengelolaan PKL, reformasi birokrasi yang diikuti penyusunan dokumen pendukung, mekanisme implementasi yang berkesinambungan dan terintegrasi, serta

pangkas anggaran dan fokus untuk pemanfaatan yang berdampak terutama kesejahteraan. (Wijayanti, 2012: 1)

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi dan Kabupaten Gresik berhasil untuk menciptakan inovasi pada bidang pelayanan publik, dimana pada kedua kota ini telah menciptakan suatu ide atau pemikiran kreatif, yang berkaitan dengan teknologi sebagai terobosan untuk mempermudah kinerja.

Hasil dari adanya inovasi Layanan SIAP PPDB Online di Kota Bekasi, yaitu diantaranya Tanpa Instalasi & Berbasis Cloud, Multi Platform & Multi Akses, Responsive Design, Multi Model Alur Pendaftaran, Multi Jalur Seleksi, Real Time Process, sehingga dapat mengelola data calon siswa secara otomatis dan langsung setiap waktu mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil.

Sedangkan, dengan adanya Aplikasi e-Planning di Kabupaten Gresik mempunyai tujuan untuk menerapkan perencanaan menggunakan teknologi informasi berbasis Web yang terintegrasi dan user friendly, menyelaraskan/ mengintegrasikan perencanaan strategis jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan, memetakan usulan program dan kegiatan dari DPRD, Unsur Pimpinan dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, menyusun rencana kerja anggaran dengan cepat dan tepat, serta mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan anggaran, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, sehingga penelitian dapat selesai dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

V. DAFTAR PUSTAKA

Andhika, L. R. (2017). Budaya Inovasi Aspek Yang Terlupakan Dalam Inovasi Kepegawaian. *Civil Service Journal*, 11(1), 49-61. Diambil dari <http://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/37>

- Banerjee, B., & Ceri, S. (2015). *Creating innovation leaders: A global perspective*. Springer.
- Basuki, Yayuk, Rulinawaty Kasmad, and N. N. (2018). Tipologi Inovasi Sektor Publik (Program Si-Cakep) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. *Jurnal Matra Pembaruan*, 1(Inovasi kebijakan), 75–84. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.297-216>
- Černe, M., Jaklič, M., & Škerlavaj, M. (2013). Authentic leadership, creativity, and innovation: A multilevel perspective. *Leadership*, 9(1), 63–85. <https://doi.org/10.1177/1742715012455130>
- Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery. *Government Information Quarterly*, 32(3), 279–286. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.03.005>
- Crivits, M., De Krom, M. P. M. M., Dessen, J., & Block, T. (2014). Why innovation is not always good: Innovation discourses and political accountability. *Outlook on Agriculture*, 43(3), 147–155. <https://doi.org/10.5367/oa.2014.0174>
- Gunawan, I. (2013). KUALITATIF Imam Gunawan. Pendidikan, 143. Diambil dari http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Kettl, D. F. (2015). *The transformation of governance: Public administration for the twenty-first century*.
- Noor, I. (2013). *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*, 1–15. Diambil dari <https://scholar.google.com/scholar?oi=bib&cluster=360656420083251686&btnI=1&hl=id>
- Sofianto, A. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah. *Matra Pembaruan*, 3(2), 99–108. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.99-108>
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance, 12, 14–31. <https://doi.org/10.31227/osf.io/6djph>
- Tahir, H. (2017). Inovasi Program Kesehatan 24 Jam Dalam Mewujudkan Good Health Care Governance di Kabupaten Bantaeng Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 2(1), 13–22.
- Uslu, T. (2015). Innovation Culture and Strategic Human Resource Management in Public and Private Sector within the Framework of Employee Ownership. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 1463–1470. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.445>
- Wijayanti, L. (2012). Implementasi Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Surakarta: Relokasi PKL di Taman Monumen Banjarsari ke Pasar Klitikan Notoharjo. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(2), 126. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i2.11565>
- Yusriadi, Y., & Misnawati, M. (2017). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 99. <https://doi.org/10.26858/jiap.v7i2.4954>